

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi. **Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan**. Raih Asa Sukses. Jakarta, 2014.
- Amirudin. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004.
- Ashshofa Burhan. **Metode Penelitian Hukum**. Rineka Cipta. Jakarta, 2004.
- Cholid dan Abu Achmadi. 1997. **Metodologi Penelitian**. Bumi Pustaka. Jakarta. 1997.
- Chairil Anwar Pohan. **Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak**. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2014.
- Friedman W. **Teori dan Filsafat Hukum**, Rajawali Press. Jakarta, 1990.
- Hanitijo Ronny Soemitro. **Metodelogi Penelitian Hukum**. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1992.
- Kaelan, Achmad Zubaidi. **Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma**, Yogyakarta, 2010.
- Kurnia Siti Rahayu. **Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Formal)**. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2013.
- Nufransa Wira Sakti, **Tax Amnesty Itu Mudah**. Visi Media. Jakarta, 2016.
- Nurmantu Safitri, **Pengantar Perpajakan**, Granit. Jakarta, 2009.
- Mahardika Putra Indra, **Perpajakan Edisi Tax Amnesty**. Quadrant. Yogyakarta, 2017.
- Mamudji Sri. **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Jakarta, Badan Penerbit FHUI, 2005
- Marihot Pahala Siahaan. **Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia**. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2010.
- Muttaqin Zainal, **Tax Amnesty di Indonesia**. PT. Refika Aditama. Bandung, 2013.
- Otoritas Jasa Keuangan. **Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Kelas X**. Otoritas Jasa Keuangan. 2014.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. **Metodologi Penelitian**. Mandar Maju. Bandung, 2008.
- Soerjono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Suand Erly. **Hukum Pajak (edisi 6)**. Salemba Empat. Jakarta. 2014.
- Widoatmodjo Sawidji. **Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia**, PT Elex Media Komputindo. Jakarta, 2015
- Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, **Hukum Pajak (Teori, Analisis, dan Perkembangannya) Edisi 6**, Salemba Empat. Jakarta. 2013.
- Y. Sri. Pudyatmoko. **Penegakan dan Perlindungan Hukum Bidang Pajak**. Salemba Empat. Jakarta. 2007.

UNDANG-UNDANG

Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4953

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4867

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5899

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2016 Tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6051

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER/11/PJ/2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Gugus Tugas (Task Force Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1043

JURNAL

Dewantara Reka, **Rekonseptulisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia.** Arena Hukum Vol. 7 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Hermansyah Evina Dhana. **Implikasi Yuridis Penetapan Direksi BPR Berbentuk PT Berdasarkan POJK Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang BPR.** Arena Hukum Vol. 9 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

WAWANCARA

Tara Setyaningtya. Kepala Sub-Bagian Pengembangan Pengelolaan Investasi I. Departemen Pengawasan Pasar Modal. Otoritas Jasa Keuangan Pusat. Jakarta. 2017.

INTERNET

www.indonesia.go.id/in/sekilas-Indonesia/politik-dan-pemerintahan, diakses pada 13 April 2017

www.lembagapajak.com/2016/09/sejarah-tax-amnesty-di-indonesia.html diakses pada 8 Mei 2017 pukul 13.50

www.kemenkeu.go.id/amnesti-pajak. Diakses pada Tanggal 8 Mei 2017 Pukul 14.07

www.ojk.go.id/id/Pages/Tax-Amnesty.aspx

www.sainsindonesia.co.id/index.php/kabar-terkini/2589-peran-ojk-mendukung-suksesnya-tax-amnesty

Pengampunan Pajak.com. Diakses pada tanggal 19 November 2017 Pukul 02.36 WIB.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Keterangan Pers : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016, Jakarta, 3 November 2015.